

Siaran Pers

MENTERI BAMBANG LUNCURKAN BUKU *FIKIH ZAKAT ON SDGS*

Jakarta, 30 Juli 2018 – Hari ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meluncurkan Buku Fikih Zakat on SDGs. Buku yang penyusunannya diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Filantropi Indonesia, dan UIN Syarif Hidayatullah dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Agama ini diluncurkan Selasa siang (30/7) di Gedung Saleh Afif, Bappenas, Jakarta, Peluncuran buku ini juga dihadiri oleh Menteri Agama H. Lukman Hakim Saefudin, Ketua Baznas Bambang Sudibyo, Ketua MUI KH. Ma'ruf Amien, Co-Chair Filantropi Indonesia Erna Witoelar, serta para pegiat zakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

Fikih Zakat on SDGs adalah terobosan ikhtiar dalam membangun relasi keduanya. Zakat sebagai instrumen distribusi ekonomi bertujuan mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi. Sementara itu, SDGs adalah satu kesepakatan masyarakat dunia untuk mewujudkan dunia yang terbebas dari kemiskinan, berkehidupan yang bermartabat, adil, dan sejahtera, serta saling bekerjasama di antara mereka. Sebuah masyarakat ideal yang diidamkan melalui perwujudan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2030. Relasi dimaksud bersifat dua arah, yaitu zakat sebagai instrumen yang mendukung pencapaian SDGs dan pada saat yang sama penerapan paradigma SDGs dalam pengelolaan zakat.

Buku Fikih Zakat on SDGs ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi pengelola zakat dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Buku ini punya peran penting karena zakat berpotensi menjadi sumber daya alternatif dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Zakat merupakan salah satu sumber daya filantropi paling potensial dan berkembang pesat di Indonesia. Data BAZNAS (2015) menunjukkan potensi zakat Indonesia mencapai **Rp 286 triliun**, sedangkan jumlah zakat yang berhasil dihimpun pada 2015 mencapai **Rp 3,6 triliun**. Sementara pendayagunaan zakat juga meluas untuk program-program yang sifatnya strategis seperti pemberdayaan ekonomi, sanitasi, perlindungan perempuan dan anak dan program-program strategis lainnya. BAZNAS bersama Filantropi Indonesia telah mendorong dan memfasilitasi peran dan keterlibatan gerakan zakat dalam pencapaian SDGs melalui platform **Zakat on SDGs** sejak November 2016.

Ketua Baznas Bambang Sudibyo menyatakan bahwa Fikih Zakat on SDGs ini sangat diperlukan karena di lapangan para pengurus lembaga zakat masih meragukan apakah zakat bisa digunakan untuk mendanai program-program terkait pencapaian SDGs, padahal sebenarnya tidak sulit mengaitkan keduanya. Karena itu, diperlukan sebuah panduan untuk melaksanakan program-program didanai zakat. Buku disusun agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf (golongan penerima zakat) yang dikaitkan dan diarahkan dengan tujuan SDGs. Buku ini diperlukan untuk menghilangkan keraguan saat implementasi di lapangan. "Pengelolaan zakat pasti akan berdampak pada pencapaian SDGs, karena tujuannya sudah pasti untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Buku ini bukan menjadi panduan dalam melaksanakan zakat, namun untuk menegaskan sesuatu yang sebetulnya sudah terjadi. Sebelum ada SDGs pun, zakat memang ditujukan untuk masalah-masalah yang ingin diatasi dalam SDGs itu," kata Ketua BAZNAS.

Sementara itu, Co-Chair Badan Pengarah Filantropi Indonesia Erna Witoelar, menambahkan bahwa Fiqih Zakat on SDGs ini akan mendorong dan memperkuat peran filantropi Islam, khususnya gerakan zakat, dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Erna menyatakan bahwa gerakan zakat sebelumnya sudah tercatat sebagai salah satu unsur penting yang berperan aktif dalam pencapaian MDGs. Meneruskan peran dan keterlibatan zakat dalam pencapaian MDGs, dapat berkontribusi signifikan dalam pencapaian SDGs dengan mengaitkan dan mengarahkan peran berbagai program-program pemanfaatan zakat dengan tujuan, target dan indikator SDGs. Fikih Zakat on SDGs ini juga bisa menjadi kontribusi muslim Indonesia dalam mendorong pendayagunaan zakat untuk pencapaian SDGs, khususnya di negara-negara islam. Melalui Fiqih zakat ini, Indonesia bisa mempelopori sekaligus menggerakkan dan mengkampanyekan gerakan zakat di negara-negara islam untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pencapaian SDGs. "Karena itu, fiqih zakat ini penting untuk disosialisasikan dan dipromosikan di berbagai forum internasional, termasuk di high level meeting Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar bisa diimplementasikan bersama," katanya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS dan Filantropi Indonesia yang telah berinisiatif untuk membantu penyusunan buku Fiqih Zakat on SDGs. “Secara khusus, saya ucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah menyelesaikan buku Fiqih Zakat on SDGs,” ujar Menteri Bambang. Menurutnya buku ini bermanfaat sebagai referensi penting bagi para pemangku kepentingan untuk memahami pelaksanaan SDGs dari sudut pandang Islam yang berdasarkan pada Al-Qur’an, hadis, dan beberapa pendapat ulama. Selain itu, buku ini juga menjelaskan potensi zakat di Indonesia yang sangat besar yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian SDGs, seperti pemanfaatan zakat untuk program-program produktif, fisik, dan pemberdayaan.

Lebih lanjut, Menteri Bambang mengatakan bahwa konsep keuangan Islam adalah menyeimbangkan antara manfaat dan risiko dengan cara yang adil dan transparan. Dengan melakukan prinsip-prinsip ini, pelaksanaan zakat dapat menghubungkan dan sekaligus menjaga hubungan antara keuangan dan ekonomi riil. Sebagai suatu sistem, zakat membantu merangsang aktivitas ekonomi dan kewirausahaan untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, menjamin stabilitas keuangan dan sosial, serta mempromosikan pengembangan manusia yang komprehensif dan berkeadilan. Semua dampak positif dari implementasi zakat sangat relevan dengan upaya pencapaian SDGs. “Dalam konteks pengentasan kemiskinan, zakat di Indonesia memiliki potensi kontribusi yang sangat besar. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, yaitu 85 persen dari total penduduk di Indonesia atau sekitar 217 juta penduduk, sehingga dana zakat dapat dikumpulkan secara optimal dari umat Islam,” tutur beliau.

Dalam sambutannya, Menteri Bambang juga menyampaikan bahwa distribusi zakat di Indonesia disirkulasikan di beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial. “Di antara sektor-sektor tersebut, sektor sosial memiliki alokasi tertinggi di tingkat nasional, dengan hampir setengah dari total dana zakat, yaitu 41,27 persen atau hampir Rp 1 triliun. Sekitar setengahnya, khususnya 20,35 persen atau hampir Rp 500 miliar, dialokasikan untuk sektor pendidikan. Sektor ekonomi dan dakwah masing-masing dengan alokasi 15,01 persen atau sekitar Rp 340 miliar, dan 14,87 persen atau sekitar Rp 330 miliar. Selain itu, proporsi terkecil dari distribusi zakat yaitu 8,5 persen atau sekitar Rp 200 miliar dialokasikan di sektor kesehatan,” pungkas Menteri Bambang.

Jakarta, 30 Juli 2018

Parulian George Andreas Silalahi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id